Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Impact Against the Law in Corruption

Elvi Zahara Lubis*

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*corresponding author: email : elvizahara@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana dampak terjadinya tindak pidana korupsi dan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi yaitu menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya pemasukan negara, berkurangnya nilai investasi, mengurangi pengeluaran biaya pendidikan dan kesehatan. Akibat dari dampak ini perusahaan maupun Negara mengalami kerugian yang sangat besar. Upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi berupa: Tindakan preventif, tindakan preventif yaitu upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan refresif, yaitu upaya yang bersifat untuk menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan tegas. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pembedaan itu sendiri.

Kata Kunci : Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Corruption has always been more Attentive compared to other crimes in different parts of the world. This phenomenon is understandable given the negative impact of this crime. The impact can touch various areas of life. Corruption is a serious matter, this crime can harm political stability, and can damage the values of democracy and morality because gradually this act seems to be a culture. Corruption poses a threat to the ideals towards a just and prosperous society. The problem to be discussed is how the impact of corruption and How prevention efforts against corruption. The impact of corruption is inhibiting development and economic growth, reduced state revenue, reduced investment value, reduced education and health expenses. As a result of this impact the company and the State suffered enormous losses. The government's efforts in preventing corruption eradication are: preventive action, preventive action that is government effort in the form of supervision done to the state apparatus with the aim of realizing the implementation of a clean and free state of corruption, collusion and nepotism. Refresher acts, ie attempts which are to suppress, curb, hold, or suppress and oppress. Efforts can be felt effective if the implementation is also done effectively, so that later able to create a deterrent effect against the perpetrators of crime and the achievement of the purpose of the theory of punishment itself.

Keywords: Nature Against Corruption In Corruption.

How to Cite: Lubis, E.Z., (2017), Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Administrasi Publik*, 7 (1): 107-116.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Makin maraknya tindak pidana korupsi dewasa ini, sehingga dianggap perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi, mengingat juga sifat dari tindak pidana korupsi yang merupakan *"extraordinary crime"*. Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh sangat masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan akses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktek korupsi inilah yang menjadi akar masalah. (Andrian, 2010: 189)

Masalah korupsi bukanlah masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara

berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggrogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. (Hamzah, 1991: 2)

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara, kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintahan di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. (www.kpk.go.id)

Perkembangan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan yang baru memang memberikan banyak celah untuk berlangsungnya tindak pidana korupsi, terutama korupsi materiil dari kelas-kelas sosial menengah dan tinggi. Namun jelas bagi kita bahwa korupsi itu menjadi tanda pengukur bagi: 1) Tidak adanya perkembangan politik yang efektif; 2) Tidak adanya partisipasi politik dari sebagian besar rakyat Indonesia khususnya rakyat miskin dan masyarakat di daerah

pendesaan; 3) Tidak adanya badan hukum dan sanksi yang mempunyai kekuatan riil. (Kartono: 30)

Salah satu agenda reformasi yang dicanangkan oleh para reformis adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada waktu digulirkannya reformasi ada suatu keyakinan bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan-landasan untuk memberantas korupsi dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2011 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan butir c konsideren Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai berikut: *"Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi"*.

Tindak lanjut dari TAP MPR RI. No.XI/MPR/1998, Maka telah disahkan dan di undangkan beberapa peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Upaya

tersebut diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Konsideran undang-undang tersebut menjelaskan bahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antara penyelenggara negara dengan pihak lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Sehingga diperlukan landasan hukum untuk mencegahnya.

Perbaikan di bidang legalisasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai penyempurna atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Konsideran undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan sosial, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hokum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta pelaku yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. (Hartanti, 2005: 6)

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah

krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara bersungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey *Transparency Internasional* Indonesia menunjukkan, bahwa peringkat Indonesia masuk rangking 126 dari 180 negara yang disurvei. Hasil penilaian badan *Transparency Internasional* pada tahun 2008 menunjukkan, bahwa peringkat Indonesia mengalami kenaikan dan fakta ini adalah merupakan hal yang sangat memprihatinkan, dikarenakan perangkat hukum dan berbagai lembaga pengawas yang sudah dibangun masih belum berjalan efektif. (www.transparency.org)

Berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantasnya. Walaupun tidak bisa memberantasnya paling tidak dapat mengurangi volumenya. Karena korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Sebagaimana yang kita ketahui sendiri, bahwa jatuhnya bangsa Indonesia ke dalam jurang multidimensional berawal dari banyaknya korupsi di setiap lembaga pemerintahan, bahkan Departemen Agama sekalipun, sebuah departemen yang membawahi pembenahan moral bagi warga Negara yang sudah ditetapkan undang-undang.

Kasus korupsi yang banyak di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang sangat sulit diselesaikan oleh pemerintah, karena hal itu sangat berkaitan dengan penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun provinsi, dan kabupaten/kota. Masyarakat sebagian masih melihat kasus korupsi terjadi melalui media elektronik maka yang terlihat adalah kasus korupsi yang merugikan negara bermilyar-milyaran rupiah, sehingga kerugian negara yang timbul sangat mencolok. Karena hal tersebut, maka kasus korupsi yang terjadi dengan secepatnya berusaha diselesaikan.

PEMBAHASAN

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan masalah korupsi. Tidak terlebih jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, bagaimana cara penanggulangannya, demikian pula perkembangan korupsi. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk memberantas tindak pidana korupsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun demikian korupsi semakin merajalela. Kerugian negara tidak hanya jutaan rupiah akan tetapi milyaran rupiah bahkan mencapai triliunan rupiah. Disisi yang lain, korupsi tidak hanyamemasuki lingkungan eksekutif saja, tetapi juga berkembang dilingkungan yudikatif dan legislatif.

Semasa orde baru korupsi dilakukan oleh orang-orang sekitar pemegang kekuasaan. Kecendrungan sekarang melebar ke lembaga-lembaga legislatif dari

tingkat daerah/kota Provinsi hingga pusat. Hampir semua jabatan memerlukan pengesahan dari legislatif dan sudah mempunyai tarif. Kegagalan ini sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan yang berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yaitu suatu kerusakan sosial yang sulit diperbaiki. (Marpaung, 2001: 27)

Tindak pidana korupsi juga merambat ke daerah-daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia, jumlah ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) semester II periode 1 juli – 31 Desember 2010. Kasus korupsi di Provinsi Sumatera Utara yang menyita perhatian ICW salah satunya adalah kasus korupsi mantan bupati Langkat, Syamsul Arifin. Syamsul Arifin di duga telah melakukan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat. Korupsi yang merugikan negara hingga Rp.102.000.000.000.000,- dilakukan Syamsul Arifin dari tahun 2000 sampai 2007. (www.google.com)

ICW juga mencatat Provinsi selain Sumatera Utara yang juga mencetak jumlah besar kasus korupsi diantaranya Bengkulu yang menduduki urutan kedua kasus korupsi tertinggi dengan jumlah 23 kasus, kemudian disusul dengan Provinsi Jawa Timur, Riau dan Sulawesi Selatan memiliki jumlah 20 kasus korupsi. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan Sumatera Utara sebagai salah satu daerah yang banyak praktek dugaan korupsi yang melibatkan

aparatur negara dinilai bukan sebuah kenyataan yang mengejutkan.

Semangat memberantas korupsi sudah ada jauh sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disahkan DPR. Faktanya tindak pidana menggerogoti uang rakyat itu justru kian menggurita dan sulit diberantas, termasuk di Sumatera Utara. Tiap tahun tindak pidana korupsi yang ada semakin meningkat, sejak April 2011. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di lingkungan Pengadilan Negeri Medan telah menyidangkan 40 perkara korupsi dengan terdakwaanya, sedangkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat perayaan 51 tahun Adhyaksa Juli 2011 lalu merilis, sebanyak 37 hutang perkara yang sedang ditangani. Diantaranya 19 perkara memasuki tahap penuntutan, 12 perkara sudah dilimpahkan kepengadilan, dan sebagian masih penyelidikan. Perkara yang proses penanganannya sudah di tingkatkan diantaranya dugaan korupsi pembangunan 7 gedung satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) batubara, dugaan penyelewengan kucuran kredit di BNI naik ke penyidikan. Awal Desember ditahun yang sama, tercatat satu perkara naik kepenyidikan (dugaan korupsi pembangunan irigasi di kabupaten samosir), sedangkan perkara lainnya jalan ditempat. Penetapan tersangka sudah dilakukan namun belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. (www.tindakpidanakorupsi.org)

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara, melainkan juga di lakukan di korporasi. Orang-orang bahkan sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa untuk dilakukan secara bersama-samadan

berkelanjutan walaupun sudah sudah jelas melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi merupakan gambaran yang menunjukkan pada kita betapa lemahnya pengawasan sebagai faktor pengaman dari pembangunan yang dapat dimanipulasi serta direkayasa guna kepentingan pribadi untuk memperkaya diri.

Korupsi telah banyak merugikan pembangunan dan terjadinya pembodohan publik guna menutupi kebobrokan dari para koruptor.

Pembangunan yang merata tidak akan tercapai dengan baik apabila pembangunan itu tidak dilengkapi dengan pengawasan pembangunan guna melindungi aset-aset Negara yang akan dirongrong oleh para koruptor. Tanpa adanya pengawasan pembangunan akan banyak terjadi kebocoran-kebocoran dan kebocoran itu pada akhirnya mampu menggagalkan pembangunan. Maka seiring dengan lajunya pembangunan, pengawasan pun harus terus berlangsung. Semakin meningkatnya pembangunan, pengawasan semakin tidak boleh surut dan menyesuaikan keadaan tersebut. Dalam melakukan pengawasan tidak boleh gegabah, pengawasan yang dilaksanakan tanpa pemikiran yang matang, bukanlah ikut memperlancar pembangunana, salah-salah justru malah menghambatnya terhadap pelaksanaannya.

Mestilah disadari pengawasan pembangunan bukanlah unsur yang berdiri sendiri, tetapi merupakan salah satu unsur dari berbagai pembangunan. Tujuan utama dari pengawasan adalah ikut berusaha

memperlancar pembangunan serta mengamankan hasil-hasil pembangunan. Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan untuk mencari-cari kesalahan dan bukan untuk menakuti-nakuti serta membuat orang gelisah, tetapi pengawasan untuk membuat agar segala perencanaan pembangunan berjalan secara lancar dan bersih.

Korupsi tampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negara kita tercinta ini, Indonesia. Korupsi lebih dari sekedar pencarian keuntungan yang bersifat individu tetapi sudah merupakan perilaku umum sehingga sebagai salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang sulit untuk dihapuskan. Korupsi juga merusak moral suatu bangsa. Jika moral suatu bangsa sudah rusak bagaimana perekonomian akan tumbuh. Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik.

Dampak-dampaknya seperti: (www.google.com): 1) Korupsi Mempersulit pembangunan ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. 2) Korupsi mengurangi pendapatan Negara, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh perusahaan milik Negara. Perusahaan-perusahaan BUMN adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk penyelewengan anggaran. 3) Korupsi Mengurangi Nilai Investasi, korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia

dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman seperti Cina dan India. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian *actual growth* dari nilai potensial *growth* yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya. ini berdampak pada menurunnya *growth* yang dicapai didasarkan atas analisa fungsi produksi dimana *growth* adalah fungsi dari investasi.

Korupsi Mengurangi Pengeluaran pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Akibat korupsi pendapatan pemerintah akan terpengkas bahkan lebih dari 50%, Agar pengeluaran-pengeluaran pemerintah tidak defisit maka di lakukan pengurangan pengeluaran pemerintah.

Korupsi mengurangi pengeluaran untuk biaya operasi dan perawatan dari infrastruktur Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum. Korupsi menurunkan produktivitas dari investasi publik dan infrastruktur suatu Negara.

Tindakan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Tindakan Preventif, tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan untuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu ada 2 bentuk pengawasan yang dilakukan: (itjen.depdagri.go.id); 2) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan

oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. 3) Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

Penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah juga dapat menjadi upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah. Sebagai upaya untuk menumbuhkan generasi yang bersih dan anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga pemerintah bekerjasama dengan Depdiknas dan sekolah. KPK menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi bekerjasama dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan.

Tujuan dilaksanakannya pendidikan anti korupsi tersebut adalah (www.kejaksaan.go.id); 1) Membentuk manusia yang mempunyai pemahaman, sikap, dan perilaku yang anti terhadap korupsi. Terutama pendidikan antikorupsi kepada anak dini usia; 2) Mengenali dan memahami dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional; 3) Memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi.

Tindakan repressif merupakan tindakan yang dilakukan sebagai upaya yang bersifat repressif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) atau tegas. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri yaitu (www.bisosial.com): 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-

nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau; Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tindakan reprensif yang telah dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan saksipidana yaitu pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana tambahan yaitu pidana denda dirasa belum mampu membuat efek takut para penyelenggara lainnya untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru yang nantinya dapat dijadikan upaya yang mampu membuat rasa takut seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Tindakan lain yang dapat ditempuh untuk memberikan efek terhadap pelaku tindak pidana korupsi diantaranya adalah seperti: 1) Sanksi pidana penjara maksimal, sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seperti yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta terhadap Angelina Sondakh berdasarkan putusan surat No: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST memberikan putusan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara. Putusan yang diberikan oleh hakim dirasa tidak mampu memberikan efek menakut-nakuti para penegak hukum (pihak) lain untuk melakukan korupsi. Sehingga perlu diberikan sanksi yang berat dengan menambah jumlah lamanya pidana penjara.

2) Pemiskinan para koruptor, Upaya pemiskinan terhadap terpidana korupsi sejatinya merupakan sanksi pidana berupa penyitaan atau perampasan aset yang diperoleh terpidana dari perbuatan korupsi yang dilakukannya. Dalam hal penerapan sanksi penyitaan atas hasil kejahatan korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tidak mengatur secara eksplisit mengenai hukuman tersebut untuk dijatuhkan kepada pelaku perorangan. Akan tetapi, dengan mengacu kepada ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka hukuman tambahan berupa penyitaan aset dapat dijatuhkan oleh majelis hakim. Memiskinkan Koruptor dapat dijadikan upaya untuk membuat efek jera terhadap pelaku korupsi bahkan efek takut pada pihak lain yang akan melakukan korupsi.

3) Penerapan sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hukuman sosial yang dimaksudkan adalah bentuk hukuman yang lebih bersifat sanksi di luar proses hukum positif. Artinya, hukuman itu berada di ranah nonformal sistem peradilan. Meskipun demikian, tak tertutup pula bentuk hukuman sosial menjadi salah satu bagian dari proses pemidanaan dalam kasus korupsi. Gagasan bentuk hukuman sosial yang paling banyak disetujui responden adalah pengumuman koruptor di media massa, seperti televisi atau koran. Sanksi sosial lainnya yang dapat diberikan kepada para koruptor adalah mengucilkan para koruptor dari pergaulan masyarakat, namun sanksi ini cenderung tidak disetujui oleh para responden. Pemberian sanksi sosial kepada pelaku tindak pidana korupsi lebih mengarah kepada pemberian rasa malu terhadap koruptor sanksi sosial seperti

mencantumkan tanda mantan koruptor di KTP. Masih banyak lagi upaya pemberian sanksi sosial yang mampu dijadikan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Dampak terjadinya tindak pidana korupsi yaitu mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintah, mengurangi pendapatan Negara, yang mungkin diterima oleh perusahaan milik Negara, mengurangi Nilai Investasi akibatnya sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia, Mengurangi Pengeluaran pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan, serta mengurangi pengeluaran untuk biaya operasi dan perawatan dari infrastruktur serta turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum. Upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melalui Tindakan preventif dan represif, tindakan preventif yaitu upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan untuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan sebagai upaya yang bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) atau tegas, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Benard, A.S., (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandiri Maju.
- D. Schaffmeister, et.al. (2002). *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J. E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty, Cet. Kedua.
- Hamzah, A. (1991), *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarata: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- _____. (2005), *Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005
- Hartanti, E. (2005), *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. .2005
- Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), Mercatoria, 6 (1): 44-63
- [http:// www.transparency.org/research/cpi/cpi](http://www.transparency.org/research/cpi/cpi). diakses pada tanggal 6 November 2014. Pukul 15:00 Wib.
- <http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html>, diakses terakhir pada tanggal 14 Maret 2015 pada
- <http://kamusbahasaIndonesia.org/aspek>. di akses pada tanggal 17 Juli 2014. Pukul 15:00 Wib.
- <http://tipsmotivasihidup.blogspot.com/2013/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2015. Pukul 19:43 Wib.
- <http://www.bisosial.com/2012/11/tujuan-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 14 Maret Pukul 14:50
- <http://www.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2015 pada pukul 14.45
- http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, Rencana strategi Pemberantasan Korupsi. Diakses pada tanggal 21 November 2014 Pukul 20:12 Wib.
- <http://www.google.com>.Sumut terbanyak Korupsi 2010. Diakses pada tanggal 6 November 2014 pukul 16:00 wib
- Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), Mercatoria, 6 (2): 117-132
- Kanter, EY dan Sianturi, S.R.. (2002), *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. 2002.
- Kholis, E.L., (2001), *Sejarah perundangan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kurniawan, L. (et al). (2003), *Menyingkap Korupsi di daerah*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.

- Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101
- Marpaung. L., (2001), *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta:Djambatan
- Marpaung. L., (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Poernomo, B., (1994), *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sapardjaja, K.E., (2002), *Ajaran Sifat Melawan Hukum Meteriil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Sutendi, A., (2010), *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang gratifikasi
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.
- Wijaya, F. (2008), *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik, Penerbit Penaku bekerjasama dengan Maharini Press*, Jakarta.
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 150-162